

ABSTRAK

Dalam sebuah perkawinan suami istri diharapkan dapat mempunyai keturunan yang baik dan diharapkan dapat meneruskan cita-cita orang tuanya. Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna bila suami istri belum dikaruniai anak, karena mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan dari sebuah perkawinan. Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak pada umumnya terjadi apabila pasangan suami istri belum atau tidak mempunyai anak, keinginan untuk mempunyai anak merupakan naluri dari manusia itu sendiri, akan tetapi karena karena kehendak Tuhan, keinginan mempunyai anak tidak tercapai. Untuk mengatasi hal tersebut yaitu keinginan untuk mempunyai anak adalah melaksakan pengangkatan anak atau adopsi. Hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membandingkan KUH Perdata (BW) dan KHI dalam hal warisan terhadap status anak angkat dalam sebuah keluarga dengan judul Perbandingan Kedudukan Antara Anak Angkat Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan berdasarkan hal itu ditemukan permasalahan yaitu a. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan kedudukan anak angkat dalam hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh simpulan Kompilasi Hukum Islam dalam hal kewarisan, anak angkat tidak terputus nasabnya dengan orang tua kandungnya, yang beralih hanya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917. Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Menurut KUH Perdata bagi anak angkat sama dengan bagi anak kandung. Sedangkan di dalam KHI anak angkat mendapatkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya (Pasal 209 KHI) terkecuali telah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli warisnya.

Kata Kunci : Warisan, Anak Angkat, Wasiat

ABSTRACT

In a marriage a husband and wife are expected to have good offspring and are expected to continue the ideals of their parents. A marriage can be said to be imperfect if a husband and wife are not blessed with children, because it has an important position and is one of the goals of a marriage. A new family is said to be complete if it consists of a father, mother and child. The adoption of adoption generally occurs when a married couple does not or does not have children, the desire to have children is an instinct from humans themselves, but because of God's will, the desire to have children is not achieved. To overcome this, the desire to have children is the adoption or adoption. Civil law in Indonesia is still pluralism because until now still apply customary law, Islamic law and western law. Based on the background of the above problems, the author is interested in comparing the Civil Code (BW) and KHI in terms of inheritance to the status of adopted children in a family with the title Comparison of Adoption Between Adopted Children in Islamic Inheritance Law Based on Compilation of Islamic Law (KHI) with the Law Code Civil Code (KUHP), and based on that found problems, namely a. What is the position of adopted children in Islamic inheritance law based on the Compilation of Islamic Law with the Civil Code; b. How are the similarities and differences in the position of adopted children in inheritance law based on the Compilation of Islamic Law with the Civil Code; This research method uses normative juridical research with a comparative approach. Normative juridical research is a research method that refers to the legal norms contained in legislation and approaches that are based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and related laws and regulations. with this research. The results obtained from the conclusions of the Compilation of Islamic Law in terms of inheritance, adoptive children are not interrupted with their biological parents, who switch only the responsibilities of biological parents to adoptive parents. Adopted children do not become heirs of adoptive parents. In Staatsblad Number 129 of 1917. In Article 5 to Article 15. The position of adopted children is found in Article 12 to equate a child with a legitimate child from the marriage of the adoptive person. According to the Civil Code for adopted children the same as for biological children. Whereas in KHI, adopted children get as much as 1/3 part of the inheritance property left by their adoptive parents (Article 209 KHI) unless they have obtained the consent of all their heirs.

Keywords: *Inheritance, Adopted Child, Testament*